RENSTRA

DPMPTSP KAB BIAK NUMFOR

TAHUN 2020 -2023



BIAK TAHUN 2022

**BAB I**

**P E N D A H U L U A N**

* 1. Latar Belakang.

Kabupaten Biak Numfor dilihat dari sisi ekonomi memiliki struktur perekonomian Pertanian dan jasa. Hal ini dapat dilihat dari komposisi PDRB berdasarkan klasifikasi kontribusi terbesar sektor primer dan tersier. Kondisi ini tidak terlepas dari posisi geografis Kabupaten Biak Numfor yang berada ditengah-tengah daerah yang mempunyai potensi pasar yang cukup besar dan potensi sumber daya manusia dalam bentuk ketersediaan tenaga kerja yang dapat menunjang terhadap pertumbuhan sektor sekunder.

Potensi lainnya posisi geografis yang dapat mempercepat proses pemasaran produk yang dihasilkan yaitu dengan tersedianya infrastruktur berupa Pelabuhan dan Bandara Type B (internasional) sehingga arus barang dan jasa baik yang masuk maupun yang keluar Kabupaten Biak Numfor relatif dapat lebih mudah dibanding dengan daerah-daerah lainnya, sehingga Kabupaten Biak numfor sampai saat ini masih menjadi salah satu daerah terbuka bagi para investor untuk menanamkan investasinya di Kabupaten Biak Numfor.

Pada Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2020-2023 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Biak Numfor dengan pengaruh perkembangan investasi itu sendiri sehingga target pada tahun 2020 masih tetap sama seperti target tahun lalu dengan pertimbangan jumlah nilai investasi yang tidak terbatas hanya pada perusahaan-perusahaan besar akan tetapi termasuk juga investasi modal kecil sesuai dengan undang-undang Nomor 5 tahun 2007 tentang penanaman modal.

Untuk mendukung keberhasilan RPJMD Kabupaten Biak Numfor tahun 2020 – 2023 pada misi ke 4 (empat) yaitu menciptakan pembangunan ekonomi yang memiliki keunggulan kompetitif dengan tujuan meningkatkan daya saing perekonomian Kabupaten Biak Numfor sebagai upaya optimalisasi kontributor sektor ekonomi terhadap pembangunan Daerah terhadap sasaran meningkatnya kemudahan investasi, maka dalam mengimplementasikan Program dan Sasarannya disusunlah program dan kegiatan pada RENSTRA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai dengan Visi dan Misi Bupati Biak Numfor. Renstra Perangkat Daerah merupakan salah satu tolok ukur dalam pencapaian kinerja sasaran yang diimplementasikan melalui program yang terukur secara kuantitatif dan kualitatif.

* 1. Landasan Hukum Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Biak Numfor Tahun 2020-2023 disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :
     1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
     2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
     3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
     4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, tentang Penanaman Modal;
     5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
     6. Inpres Nomor 3 Tahun 2006, tentang Paket Kebijakan Iklim Investasi;
     7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
     8. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan berusaha;
     9. Permendagri Nomor 138 Tahun 2017, tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
     10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
     11. Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2016 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
     12. Peraturan Bupati Biak Numfor Nomor 175 Tahun 2018 Tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatangan Perizinan dan Non Perizinan di Lingkungan Kabupaten Biak Numfor;
     13. Peraturan Bupati Biak Numfor Nomor 164 Tahun 2018 tentang Satgas Percepatan Pelaksanaan Berusaha Kabupaten Biak Numfor;
     14. Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2018 tentang Tim Teknis Perijinan dan Non Perijinan Kabupaten Biak Numfor.
  2. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Biak Numfor Tahun 2020-2023 yaitu :

1. Dijadikan sebagai arah kebijakan dan program dalam rangka pelaksanaan pembangunan khususnya di bidang penanaman modal dan perizinan di Kabupaten Biak Numfor;
2. Sebagai penjabaran implementatif dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Biak Numfor Tahun 2020 – 2023 Dalam Misi ke 4 yaitu Menciptakan Pembangunan Ekonomi yang memiliki keunggulan kompetitif pada sektor Penanaman Modal Kabupaten Biak Numfor;
3. Menjadi salah satu pedoman dan bahan acuan bagi seluruh unsur pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Biak Numfor;

Tujuan disusunnya Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Biak Numfor, yaitu :

1. Membantu seluruh jajaran petugas/aparatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Biak Numfor dalam pencapaian tujuan dan sasaran berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam pembangunan bidang penanaman modal dan perizinan di Kabupaten Biak Numfor;
2. Untuk memudahkan bagi para pemangku kepentingan dalam pembangunan penanaman modal dan perizinan di Kabupaten Biak Numfor;
3. Mengarahkan pembangunan bidang penanaman modal dan perizinan di Kabupaten Biak Numfor pada tujuan dan sasaran yang ingin dicapai selama kurun lima tahun kedepan.
   1. Sistimatika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Biak Numfor Tahun 2020 – 2023 disusun berdasarkan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan, berisikan latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Biak Numfor.

BAB II Menjelaskan Gambaran Umum Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Biak Numfor, meliputi: tugas, fungsi dan struktur organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Biak Numfor, sumber daya yang dimiliki dan kinerja, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan;

BAB III Membahas Isu-isu Strategis berdasarkan tugas dan fungsi yang diemban oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Biak Numfor. Pada bab ini dipaparkan identifikasi permasalahan penentuan isu-isu strategis;

BAB IV Dijelaskan Visi, Misi Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor, tujuan dan sasaran, serta strategi dan kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Biak Numfor

BAB V Menguraikan rencana program dan kegiatan sebagai penjabaran dari strategi kebijakan yang ditetapkan, serta indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif;

BAB VI Menjelaskan indikator kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Biak Numfor yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Biak Numfor

BAB VII Penutup.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH (PD)

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Biak Numfor.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Biak Numfor dibentuk sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 3 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Biak Numfor. Dinas ini sebagai pengembangan dari Kantor Penanaman Modal dan Perijinan Kabupaten Biak Numfor, sebagai lembaga teknis di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Biak Numfor. Adapun Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ditetapkan dalam Surat Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Biak Numfor yaitu Menyusun dan melaksanakan Kebijakan di Bidang Penanaman Modal yang meliputi Promosi dan Penggalian Potensi Penanaman Modal, Pengendalian, Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta melaksanakan ketatausahaan Dinas.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Biak Numfor mempunyai fungsi : Melaksanakan perumusan dan menentukan kebijakan teknis di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang meliputi Promosi Investasi, Pengembangan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu serta pelayanan teknis administrasi ketatausahaan.

Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Biak Numfor.

**STRUKTUR ORGANISASI**

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

**KABUPATEN BIAK NUMFOR PROVINSI PAPUA**

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Biak Numfor

Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Biak Numfor

KEPALA DINAS

**HERY MULYANA, S.Sos., M.Si**

JABATAN FUNGSIONAL

SUB BAGIAN UMUM

DAN KEPEGAWAIAN

**MILKA B.Y. KAFIAR, SE**

SUB BAGIAN PROGRAM

DAN KEUANGAN

**ILONA L. KORWA, SE**

BIDANG PERIZINAN JASA USAHA

**NUR WIDAYATI, SE**

BIDANG

PERIZINAN TERTENTU

**LAURENS L. IWANGGIN, SH., MM**

BIDANG INVESTASI DAN PENANAMAN MODAL

PTT. ANTHON MARJEN, A.Md. Kom

SEKSI PELAYANAN PROMOSI DAN PERENCANAAN INVESTASI

**MARLINE S. C. MAKMAKER, SE**

SEKSI PENGADUAN

DAN PENGAWASAN

**EDWIN M. SMASS, SH**

SEKSI PERIZINAN

PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN

DAN KOPERASI

BENNY R. MANURUNG, SE

SEKSI PERIZINAN

PERHUBUNGAN,

PARIWISATA DAN

PERTANIAN

**DORKAS D. MORIN, S.Sos**

SEKSI PERIZINAN PEKERJAAN UMUM

DAN TATA RUANG

**PIET HEIN AIBEKOB, S.Kom**

SEKRETARIS

**ABRAHAM YARANGGA, S.Sos., MM**

SEKSI PERIZINAN PENDIDIKAN, KESEHATAN

DAN KETENAGAKERJAAN

**SHERLY WABISER, S.Kom**

UPTD

Keterangan : Garis Instruktif

Garis Koordinatif

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN

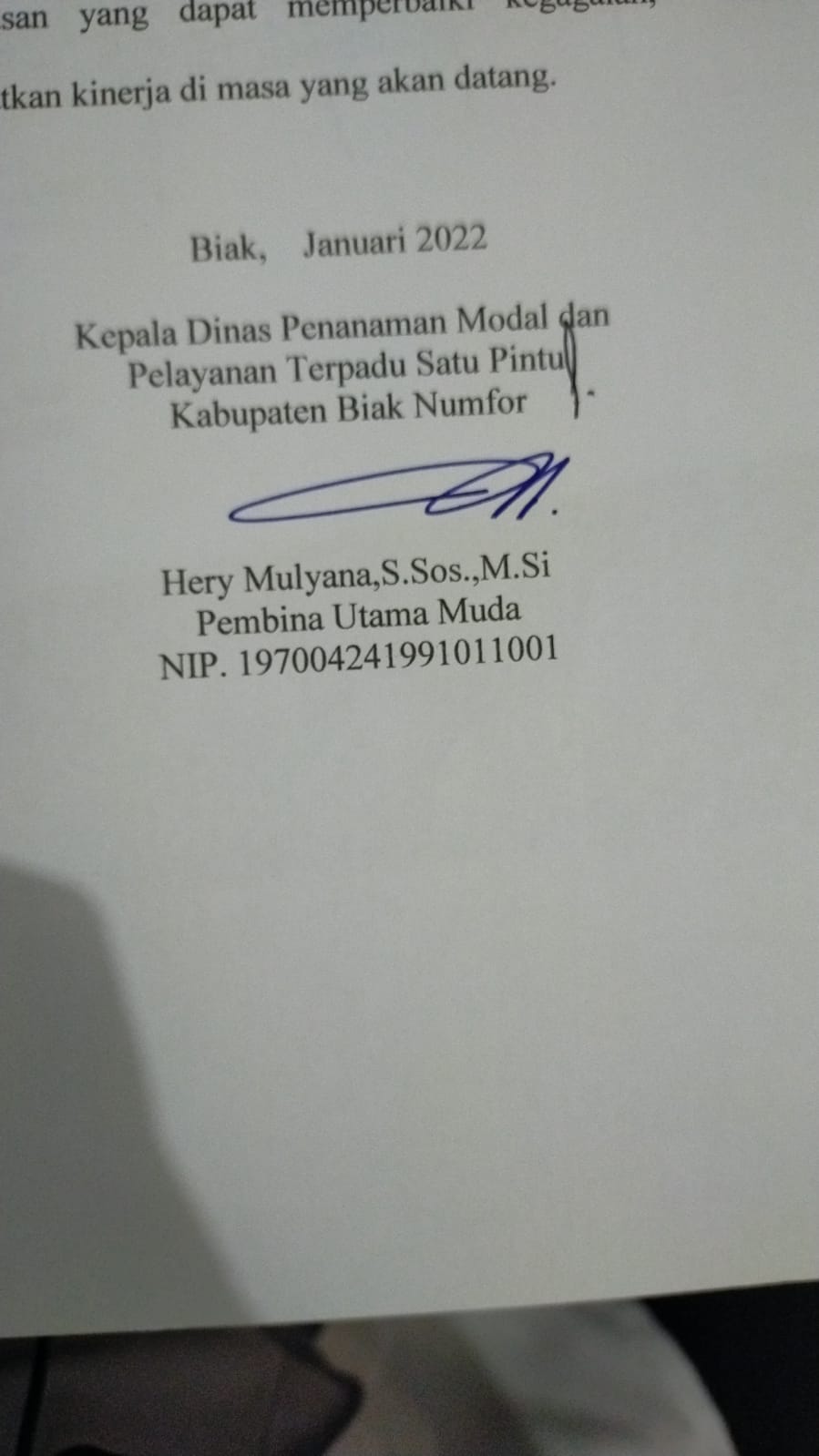
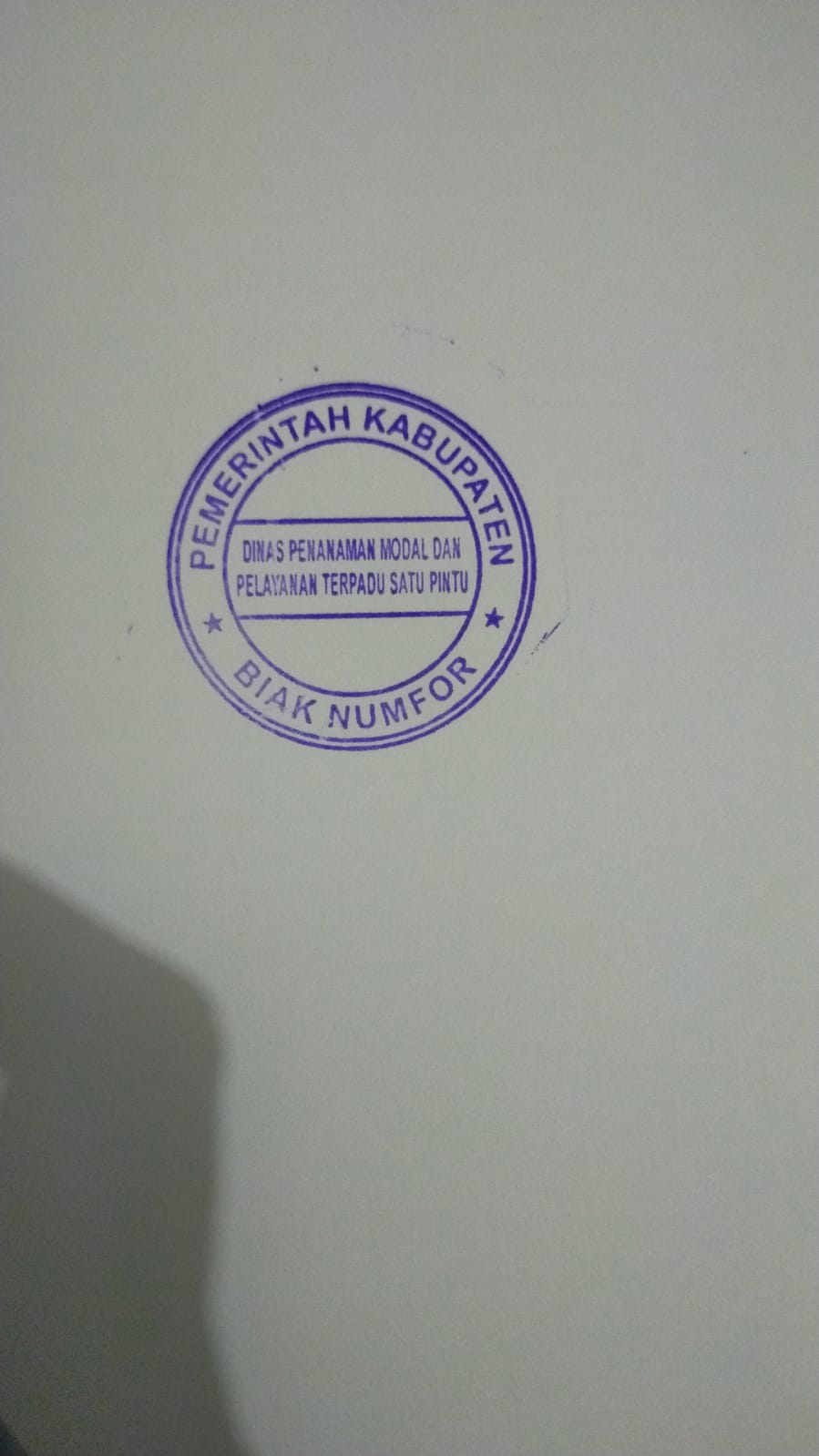
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN BIAK NUMFOR

**HERY MULYANA, S.Sos., M.Si**

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19700424 199101 1 001



2.2 Sumber daya Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

a. Kondisi Sumber daya Manusia Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Biak Numfor. Kondisi dan potensi yang ada di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Biak Numfor merupakan faktor kekuatan yang sangat mempengaruhi keberhasilan dalam mencapai Visi dan Misi Kepala Daerah Kabupaten Biak Numfor urusan Penanaman Modal, adapun faktor-faktor kekuatan tersebut antara lain :

Struktur organisasi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Biak Numfor berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Biak Numfor, dan Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2016 tentang Rincian tupoksi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Biak Numfor.

Tabel 1

Data Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Berdasarkan Satuan Kerja

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NO | SATUAN KERJA | JUMLAH | KETERANGAN |
| 1 | Kepala Dinas | 1 |  |
| 2 | Sekretaris Dinas | 1 |  |
| 3 | Sekretariat | 11 |  |
| 4 | Bidang Investasi dan Penanaman Modal | 3 |  |
| 5 | Bidang Perizinan Jasa Usaha | 4 |  |
| 6 | Bidang Perizinan Tertentu | 5 |  |
|  | JUMLAH | 25 |  |

Tabel 2

Data Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Berdasarkan Golongan Dan Ruang

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NO | GOLONGAN/RUANG | JUMLAH | KETERANGAN |
| 1 | IV/c | 1 |  |
| 2 | IV/b | 1 |  |
| 3 | IV/a | 2 |  |
| 4 | III/d | 3 |  |
| 5 | III/c | 6 |  |
| 6 | III/b | 2 |  |
| 7 | III/a | 5 |  |
| 8 | II/d | 1 |  |
| 9 | II/c | 2 |  |
| 10 | II/b | 1 |  |
| 11 | I/d | 1 |  |
|  | JUMLAH | 23 |  |

Pegawai Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagian besar berpendidikan sarjana, hal ini merupakan salah satu pendorong dan modal dasar untuk menciptakan profesionalisme berencana.

Tabel 3

Komposisi Pegawai Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Berdasarkan Golongan Per 1 April 2020

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NO** | **GOLONGAN** | **JUMLAH** |
| 1 | IV | 4 |
| 2 | III | 13 |
| 3 | II | 6 |
| 4 | I | 1 |
| 5 | Honorer | 4 |
|  | **TOTAL** | **27** |

Tabel 4.

Komposisi Pegawai Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Berdasarkan Pendidikan Per 31 Desember 2020

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NO** | **PENDIDIKAN** | **JUMLAH** |
| 1 | Strata 3 (S3) | - |
| 2 | Strata 2 (S2) | 4 |
| 3 | Strata 1 (S1) | 10 |
| 4 | D4 | - |
| 5 | D3 / Akademi | 7 |
| 6 | SMU / Sederajat | 2 |
| 7 | SLTP | 1 |
| 8 | SD | - |
|  | **TOTAL** | **25** |

- Sistem jaringan informasi yang dimilik Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terakses dengan [www.dpmptsp.biakkab.go.id](http://www.dpmptsp.biakkab.go.id).

- Sistem Layanan Perizinan online yang bisa diakses melalui website [www.dpmptspbiak.com](http://www.dpmptspbiak.com) atau <http://sicantikui.layanan.go.id/#/> dan [www.oss.go.id](http://www.oss.go.id)

- Tersedianya sarana dan prasarana kerja di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Biak Numfor yang cukup memadai dapat membantu dalam menunjang kinerja pelayanan publik.

b. Sarana dan Prasarana

1. Gedung Kantor

2. Ruang Pelayanan, ruang rapat, ruang tunggu

3. Kendaraan Bermotor ( 2 unit roda 4 dan 5 unit roda 2)

4. Peralatan Elektronik (PC 8, laptop, Notebook ..., Printer 3, mesin tik ...)

5. Meja 17, Kursi 51 , Lemari 2

6. Ac 4, Kipas Angin 1

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

2.3.1. Kinerja Penanaman Modal

Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Biak Numfor sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi adalah membantu Kepala Daerah khususnya dalam pelaksanaan pembangunan penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Perizinan).

Tabel 5.

PERKEMBANGAN REALISASI INVESTASI PMA DAN PMDN

DI KABUPATEN BIAK NUMFOR BERDASARKAN SURAT IZIN USAHA LAINNYA TAHUN 2020

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | INDIKATOR KINERJA UTAMA | PENJELASAN FORMULASI PERHITUNGAN | TARGET 2020 | REALISASI | CAPAIAN | PENANGGUNG JAWAB |
| 1 | NILAI MUTU PELAYANAN (IKM) INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT | BERDASARKAN JUMLAH DATA RESPONDEN YANG MENGURUS PERIJINAN DAN NON PERIJINAN  IKM =NILAI PERSEPSI PERUNSUR X NILAI PENIMBANG  TOTAL NILAI UNSUR TERISI | NILAI INTERVAL IKM = 80 | 62% | TERUKURNYA MUTU PELAYANAN | DPMPTSP |
| 2 | NILAI INVESTASI PMA / PMDN | JUMLAH NILAI PMA DAN PMDN YANG TEREALISASI |  |  |  | DPMPTSP |
| PERDAGANGAN BESAR | 17 USAHA | 54.570.000.000 |  |
| PERDAGANGAN SEDANG | 20 USAHA | 10.134.000.000 |  |
| PERDAGANGAN KECIL | 261 USAHA | 108.050.000.000 |  |
| 3 | MENINGKATNYA DAYA TARIK PENANAMAN MODAL | JUMLAH KAJIAN INVESTASI YANG DISUSUN | - | - | - | - |
| JUMLAH SISTEM INFORMASI TERINTEGRASI | SICANTIK  OSS (ONLINE SINGLE SUBMISION) | 2 SIM | 50 % | DPMPTSP |
| JUMLAH PAMERAN PROMOSI DALAM DAN LUAR NEGERI | - | - | - | - |
| JUMLAH INVESTOR YANG BERMINAT INVESTASI | - | - | - | - |
| 4 | MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PERIJINAN | JUMLAH PERIJINAN SESUAI SOP | 2777 | 2777 | 100 % |  |
| SITU | - | - | - |  |
| IMB | 57 | 57 | 100 % |  |
| KESEHATAN | 284 | 284 | 100 % |  |
| SIP RUMAH DINAS | 76 | 76 | 100 % |  |
| TRAYEK | 40 | 40 | 100 % |  |
| PRINSIP | 5 | 5 | 100 % |  |
| LINGKUNGAN | 2 | 2 | 100 % |  |
| SIUJK | 144 | 144 | 100 % |  |
| SIUP | 596 | 596 | 100 % |  |
| TDP | 596 | 596 | 100 % |  |
| TDG | 5 | 5 | 100 % |  |
| TDI | - | - |  |  |
| IUI | - | - |  |  |
| TPKUP |  |  |  |  |
| SIPA |  |  |  |  |
| PROSENTASE PERIJINAN YANG TERBIT |  |  |  |  |
| JUMLAH RETRIBUSI PERIJINAN |  |  |  |  |

Tabel 6.

Perkembangan Realisasi Investasi PMDN/PMA di Kabupaten Biak Numfor Berdasarkan LKPM Tahun 2016 s.d. 2017

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TAHUN | JUMLAH PROYEK | REALISASI INVESTASI  RP | PENYERAPAN TENAGA KERJA | |
| INDONESIA | ASING |
| 2020 | IMB 16 |  |  |  |
|  | SIPD 35 |  |  |  |
|  | SIPP 111 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

Tabel 7.

Perkembangan Realisasi PMA/PMDN di Kabupaten Biak Numfor Berdasarkan ijin Usaha Menurut Sektor Usaha Tahun 2020

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | SEKTOR USAHA | JUMLAH PROYEK | NILAI INVESTASI  RP | PENYERAPAN TENAGA KERJA | |
| INDONESIA | ASING |
| 1 | SEKTOR PRIMER |  |  |  |  |
| 1 | TANAMAN PANGAN DAN PERKEBUNAN | - | - | - | - |
| 2 | PETERNAKAN | - | - | - | - |
| 3 | PERKEBUNAN | - | - | - | - |
| 4 | PERIKANAN |  |  |  |  |
| 5 | PERTAMBANGAN | - | - | - | - |
| II | SEKTOR SEKUNDER |  |  |  |  |
| 1 | INDUSTRI MAKANAN | - | - | - | - |
| 2 | INDUSTRI TEKSTIL | - | - | - | - |
| 3 | INDUSTRI DARI KULIT DAN ALAS KAKI | - | - | - | - |
| 4 | INDUSTRI KAYU |  |  |  |  |
| 5 | INDUSTRI KERTAS DAN PERCETAKAN | - | - | - | - |
| 6 | INDUSTRI KIMIA FARMASI | - | - | - | - |
| 7 | INDUSTRI KARET DAN PLASTIK | - | - | - | - |
| 8 | INDUSTRI MINERAL NON LOGAM | - | - | - | - |
| 9 | INDUSTRI LOGAM,MESIN DAN ELEKTONIKA | - | - | - | - |
| 10 | Industri Instrumen kedokteran, presisi, optik dan jam | - | - | - | - |
| 11 | Industri Kendaraan bermotor & alat transportasi lain | - | - | - | - |
| 12 | INDUSTRI LAINNYA | - | - | - | - |
| III | SEKTOR TERSIER |  |  |  |  |
| 1 | LISTRIK, GAS DAN AIR |  |  |  |  |
| 2 | KONSTRUKSI |  |  |  |  |
| 3 | PERDAGANGAN DAN REPARASI |  |  |  |  |
| 4 | HOTEL DAN RESTORAN |  |  |  |  |
| 5 | TRANSPORTASI, GUDANG DAN KOMUNIKASI |  |  |  |  |
| 6 | PERUMAHAN,KAWASAN INDUSTRI DAN PERKANTORAN |  |  |  |  |
| 7 | JASA LAINNYA |  |  |  |  |
|  | JUMLAH |  |  |  |  |

Tabel 8.

Peringkat Investasi PMA/PMDN di Kabupaten Biak Numfor Berdasarkan ijin Usaha Menurut Lokasi Usaha Tahun 2017

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | LOKASI USAHA | JUMLAH PROYEK | NILAI INVESTASI  RP | PENYERAPAN TENAGA KERJA | | RASIO |
| INDONESIA | ASING |
| 1 | BIAK KOTA |  |  |  |  |  |
| 2 | SAMOFA |  |  |  |  |  |
| 3 | YENDIDORI |  |  |  |  |  |
| 4 | BIAK BARAT |  |  |  |  |  |
| 5 | SWANDIWE |  |  |  |  |  |
| 6 | BIAK UTARA |  |  |  |  |  |
| 7 | ANDEY |  |  |  |  |  |
| 8 | YAWOSI |  |  |  |  |  |
| 9 | WARSA |  |  |  |  |  |
| 10 | BONDIFUAR |  |  |  |  |  |
| 11 | BIAK TIMUR |  |  |  |  |  |
| 12 | ORIDEK |  |  |  |  |  |
| 13 | PADAIDO |  |  |  |  |  |
| 14 | AIMANDO |  |  |  |  |  |
| 15 | NUMFOR TIMUR |  |  |  |  |  |
| 16 | POIRU |  |  |  |  |  |
| 17 | BRUYADORI |  |  |  |  |  |
| 18 | NUMFOR BARAT |  |  |  |  |  |
| 19 | ORKERI |  |  |  |  |  |

Tabel 9,

Perkembangan Rekapitulasi Jumlah PMA/PMDN

Berdasarkan Izin Usaha Menurut Kualifikasi Usaha Tahun 2020

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | KUALIFIKASI USAHA | JUMLAH PROYEK | NILAI INVESTASI | PENYERAPAN TENAGA KERJA | |
| INDONESIA | ASING |
| 1 | PERDAGANGAN BESAR | - USAHA | 50 JT – 500 JT |  |  |
| 2 | PERDAGANGAN SEDANG | 14 USAHA | 500 JT – 10 M |  |  |
| 3 | PERDAGANGAN KECIL | 571 USAHA | 10 M - KEATAS |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

2.3.2. Kinerja Pelayanan Perijinan

Berdasarkan Perbup Nomor 175 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan PTSP terdapat 93 jenis kewenangan yang dilaksanakan pada PTSP/BPMP Kabupaten Biak Numfor.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **JENIS PERIJINAN** | **TAHUN** | | | |
| **2016** | **2017** | **2018** | **2020** |
| 1 | IJIN LOKASI |  |  |  |  |
| 2 | IJIN LINGKUNGAN |  |  |  |  |
| 3 | IMTA |  |  |  |  |
| 4 | IMB |  |  |  |  |
| 5 | IMB MENARA TELKOM |  |  |  |  |
| 6 | IJIN MENDIRIKAN KLINIK PRATAMA |  |  |  |  |
| 7 | IJIN MENDIRIKAN KLINIK UTAMA |  |  |  |  |
| 8 | IJIN MENDIRIKAN KLINIK KECANTIKAN |  |  |  |  |
| 9 | IMRS KELAS C |  |  |  |  |
| 10 | IMRS KELAS D |  |  |  |  |
| 11 | IZIN GANGGUAN (HO) |  |  |  |  |
| 12 | IPBL |  |  |  |  |
| 13 | TPS B3 |  |  |  |  |
| `14 | IPL B3 |  |  |  |  |
| 15 | IUI |  |  |  |  |
| 16 | TDI |  |  |  |  |
| 17 | IJIN PRINSIP PENANAMAN MODAL |  |  |  |  |
| 18 | IJIN PRINSIP PERLUASAN P MODAL |  |  |  |  |
| 19 | IJIN PRINSIP PERUBAHAN P MODAL |  |  |  |  |
| 20 | IJIN PRINSIP PENGGABUNGAN P MODAL |  |  |  |  |
| 21 | IUJK |  |  |  |  |
| 22 | IJIN PENYELENGGARAAN REKLAME |  |  |  |  |
| 23 | TDUP |  |  |  | 17 |
| 24 | SIUK TETAP |  |  |  |  |
| 25 | IJIN PRINSIP MENDIRIKAN MENARA |  |  |  |  |
| 26 | IJIN PENANAMAN PIPA, KABEL FO |  |  |  |  |
| 27 | SIUP |  |  |  | 596 |
| 28 | TDP |  |  |  | 596 |
| 29 | TDG |  |  |  | 5 |
| 30 | IUTM |  |  |  |  |
| 31 | IUP2T |  |  |  |  |
| 32 | IUPP |  |  |  |  |
| 33 | IJIN OPERASI PUSKESMAS |  |  |  |  |
| 34 | IJIN OPS. KLINIK PRATAMA |  |  |  |  |
| 35 | IJIN OPS KLINIK UTAMA |  |  |  |  |
| 36 | IJIN OPS KLINIK KECANTIKAN |  |  |  |  |
| 37 | IJIN USAHA PERIKANAN |  |  |  |  |
| 38 | IUP |  |  |  |  |
| 39 | IUP B |  |  |  |  |
| 40 | IUP P |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Kabupaten Biak Numfor Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Pemerintah Daerah Kabupaten Biak Numfor Telah merubah tupoksi kelembagaan pelayanan penanaman modal dan pelayanan perijinan dari yang bersifat koordinasi menjadi Perangkat Daerah Teknis. Adanya perubahan nomenklatur menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terhadap pelaksanaan pelayanan akan lebih optimal, sehingga akan menjadi tantangan untuk lebih bekerja keras dan berkomitmen terhadap tupoksi Dinas. Tantangan lain yaitu kesiapan terhadap pasar bebas, Percepatan Pemberian izin dan non izin dan Pelimpahan Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan. Adapun peluang pengembangan penanaman modal sebagai daerah Kabupaten yang memiliki luas Daerah 2602 km2 dengan jumlah penduduk 145.000 dengan potensi unggulan pada sektor primer (pariwisata, Tanaman Pangan dan Perkebunan, Peternakan, Perikanan), sektor sekunder (sektor jasa lainnya) dan sektor tersier (Listrik, air, dan Kontruksi, Perdagangan dan reparasi, Hotel dan Restoran, Tranportasi, gudang & komunikasi, Perumahan, kawasan pariwisata & Perkantoran, Jasa lainnya) yang tersebar pada 19 Distrik. Sangat strategis untuk dikembangkan dan ditawarkan kepada investor sehingga diharapkan peningkatan minat investasi terutama terhadap hasil kajian potensi unggulan di Kabupaten Biak Numfor. Langkah strategis dalam rangka menarik minat investor untuk berinvestasi di Kabupaten Biak Numfor antara lain :

 Melaksanakan Promosi peluang investasi potensi unggulan Kabupaten Biak Numfor di dalam dan luar Negeri;

 Optimalisasi Pelayanan Perijinan yang cepat, mudah, murah, transparan dan pasti.

BAB III

ISU ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Perpres RI Nomor 97 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Biak Numfor telah menetapkan Perda Nomor 24 tahun 2016 tentang penyelenggaran PTSP, Perbup Nomor 175 Tahun 2018 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan pendelegasian kewenangan Bupati kepada penyelenggara PTSP sebanyak 93 jenis Pelayanan. Perda tersebut menjadi dasar pada pelaksanaan urusan penanaman modal dan PTSP sekaligus dalam menentukan Isu Strategis sesuai dengan Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Biak Numfor. Sejalan dengan peraturan perundangan yang telah ditetapkan tidak terlepas dari keterkaitan dalam pelaksanaannya terhadap peraturan perundangan yang lebih tinggi pada urusan Penanaman Modal dan PTSP antara lain: 1. Undang-undang No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik khususnya terkait dengan Standar Pelayanan Minimal Penanaman Modal yang ditetapkan dalam perka BKPM RI Nomor 7 Tahun 2018, yang meliputi :

* 1. Kebijakan Penanaman Modal;
  2. Kerjasama Penanaman Modal;
  3. Promosi Penanaman Modal;
  4. Pelayanan Penanaman Modal;
  5. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
  6. Pengelolaan data dan informasi Penanaman Modal; dan
  7. Penyebarluasan, Pendidikan dan Pelatihan Penanaman Modal.

Tabel 10

Identifikasi Permasalahan

Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Biak Numfor

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Aspek kajian | Capaian kondisi saat ini | Faktor yang mempengaruhi |
| 1.Pelaksanaan Pelayanan |  Pelayanan Penanaman Modal belum memenuhi Standar target   Pelayanan administerasi Perijinan belum memenuhi standar target |  Masih kurangnya Kuantitas dan Kompetensi SDM, Standar Pelayanan,   Data Peluang Investasi masih belum up to date,   SOP dan Standar Pelayanan masih belum up to date sesuai dengan jumlah jenis pelayanan,   Kurangnya kesadaran Insvestor untuk melaporkan Perkembangan usahanya,   Kurangnya Komitmen antara Perangkat Daerah teknis pada proses pelayanan |
| 2.Pengelolaan Pengaduan Masyarakat |  Pengaduan Pelaksanaan Penanaman modal masih Belum tercapai  Pengaduan Proses Pelayanan Perijinanterpadu belum mencapai target |  mekanisme pengaduan kurang jelas   Peningkatan Kompetensi Pelaksana SDM belum optimal |
| 3.Pengelolaan Informasi |  Penyediaan infra struktur dan sistem informasi pelayanan perijinan masih belum berjalan dengan baik   Data base dan aplikasi perijinan   Sarana Penunjang Promosi Investasi belum optimal |  Belum semua Perangkat Daerah teknis mengintegrasikan perizinan kepada DPMPTSP   Belum terwujudnya aplikasi perizinan yang terintegrasi dengan OPD teknis |
| 4.Pengawasan Internal |  Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal belum memenuhi target   Monev Pelayanan perizinan terpadu belum optimal | Manajemen penatalaksanaan, penataan system manajemen SDM dan penguatan pengawasan, akuntabilitas kinerja belum optimal |
| 5.Penyuluhan kepada masyarakat dan pelayanan konsultasi |  Kinerja pengelolaan penyuluhan kepada masyarakat masih belum optimal |  SOP belum lengkap   Sapras pendukung masih terbatas   Kualitas dan kuantitas SDM pelaksana masih rendah |
| 6.Sumber daya aparatur |  Masih terbatas kompetensi SDM dalam melaksanakan tugas pelayanan penanaman modal dan PTSP |  Belum meratanya kompetensi SDM aparatur Penanaman Modal dan |

3.2. Penentuan Isu Strategis Berdasarkan hasil identifikasi masalah diatas maka dapat disimpulkan isu strategis pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai berikut :

* + 1. Peluang Potensi Investasi belum termanfaatkan secara optimal;
    2. Sarana dan prasarana infrastruktur yang masih belum memadai sesuai yang diharapkan untuk menunjang investor masuk ke Kabupaten Biak Numfor;
    3. Percepatan layanan perizinan terhadap pemohon izin belum optimal khususnya kepada pemohon izin yang memerlukan kajian teknis dari PD teknis (Birokrasi perizinan belum satu pintu);
    4. Promosi Potensi Investasi kepada Insvestor asing/dalam Negeri belum optimal;
    5. Kapasitas Aparatur pada Kelembagaan yang menangani Penanaman Modal masih belum optimal.
    6. Stimulus dari pemerintah masih rendah;
    7. Masih belum semua jenis pelayanan menggunakan system online.

Penentuan isu strategis diatas juga memperhatikan isu strategis RPJMD Kabupaten Biak Numfor dalam sektor investasi/penanaman modal, kebijakan akan diarahkan pada upaya peningkatan investasi, khususnya dalam sektor ekonomi kreatif. Arah kebijakan terkait hal tersebut diantaranya :

* 1. Peningkatan fasilitasi kerjasama bidang investasi oleh pemerintah;
  2. Peningkatan branding daerah, promosi dan potensi investasi;
  3. Peningkatan efektivitas prosedur perijinan investasi.

3.3 Telaahaan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Berkaitan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Biak Numfor, terdapat beberapa kawasan yang memiliki fungsi strategis, struktur dan pola ruang. Kawasan prioritas yang akan dikembangkan meliputi :

1. Kecamatan Biak Kota
2. Kecamatan Samofa.
3. Kecamatan Aimando Padaido

RencanaStrategis 2020-2023. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Biak Numfor. Berdasarkan analisis RT/RW dan KLHS diharapkan dapat menjadi informasi dan daya tarik investor untuk berinvestasi mengembangkan kawasan terpadu diatas.

3.4. Analisis SWOT (Strengthts, Weaknesses, Opportunity, Threats) analisis adalah proses assessment yang subjektif pada suatu organisasi secara terstruktur untuk mengidentifikasi faktor-faktor strategis yang berupa kekuatan dan kelemahan serta faktor peluang dan ancaman.

a. Kekuatan (Strengh)

 Perubahan Kelembagaan berdasarkan Perda 24 Tahun 2016 tentang Susunan dan Pembentukan Perangkat Daerah dari Badan Penanaman Modal dan Perijinan menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Biak Numfor;

 Perbup 175 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan PPTSP pelimpahan sebagian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan non Perizinan;

 Permendagri 138 tahun 2017 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;

1. Kelemahan (Weakness)

 Masih adanya Perizinan dan non perizinan yang di proses di masing masing OPD;

 Belum optimalnya Sumber daya Aparatur Penanaman Modal dan Perizinan belum sesuai keahlian di bidang masing-masing (belum Kompeten);

 Belum optimalnya Pelayanan Perizinan Secara Online;

 Data Peluang investasi belum up to date.

1. Peluang (Opportunity)

 Adanya kebijakan Nasional untuk mendukung penyelenggaraan penanaman modal yang terintegrasi dengan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

 Banyaknya Penawaran Pengembangan Sumber Daya Manusia berupa Diklat dan Bimtek baik dari Lembaga/Departemen maupun non Departemen/swasta;

 Adanya kebutuhan investor dan calon investor akan jasa layanan Dinas Penanaman Modal dan PTSP;

 Banyaknya tawaran pameran promosi investasi di dalam negeri maupun luar negeri.

1. Tantangan (Threat)

 Jumlah dan laju pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi;

 Pasar bebas;

* Inmendagri Nomor 570 Tahun 2012 Tentang Percepatan Pemberian Izin dan Non Izin;

 Belum semua data base penanaman modal dan perizinan terintegrasi dengan OPD terkait;

 Belum tergalinya potensi perizinan di Kabupaten Biak Numfor;

 Kurangnya kesadaran investor untuk melaporkan perkembangan Usahanya.

**BAB IV**

**VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN DAN KEBIJAKAN**

4.1 Visi dan Misi

1. Pernyataan Visi

Visi merupakan pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana suatu organisasi harus dibawa berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis,antisipatif, inovatif dan produktif. Visi dapat membantu organisasi untuk mendefinisikan kemana organisasi akan dibawa dan membantu mendefinisikan bagaimana pelayanan harus dilaksanakan. Sedangkan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 8 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2013-2018, Visi Kabupaten Biak Numfor adalah ” KABUPATEN BIAK NUMFOR MENJADI KABUPATEN RELIGIUS, BERKARAKTER DAN BERBUDAYA ” yang akan dilanjutkan dengan VISI Tahun 2019 – 2023 BIAK RELIGIUS, BERKARAKTER DAN BERBUDAYA.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tersebut dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta masukan-masukan dari stakeholders, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Biak Numfor menetapkan Visi :

“Terwujudnya Iklim Penanaman Modal kondusif dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu yang memberikan Pelayanan Prima”

Makna Visi ini adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya iklim adalah terlaksananya kondisi stabilitas ekonomi pada suatu daerah.
2. Penanaman Modal adalah kondisi internal maupun eksternal yang mempengaruhi kegiatan penanaman modal.
3. Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu adalah untuk menyelenggarakan pelayanan perizinan kepada masyarakat yang prima, sehingga hal tersebut dapat mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif bagi penanaman modal dan investasi dalam rangka memberdayakan ekonomi masyarakat.

2. Pernyataan Misi

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan (stakeholders) dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Misi suatu instansi harus jelas dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Misi juga terkait dengan kewenangan yang dimiliki oleh instansi pemerintah. Sedangkan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

Berdasarkan Visi dan Misi Kabupaten Biak Numfor Tahun 2020-2023 dan Visi DPMPTSP Kabupaten Biak Numfor, tugas dan fungsi DPMPTSP serta masukan-masukan dari pihak yang berkepentingan (stakeholders), maka ditetapkan Misi DPMPTSP Kabupaten Biak Numfor sebagai berikut :

Misi Pertama : ”Meningkatkan Potensi, Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal’’

Misi 1 : mengandung makna Bahwa perlunya meningkatkan Iklim investasi di Kabupaten Biak Numfor.

Misi Kedua : ”Mengembangkan Kualitas Sistem Informasi penanaman modal dan pelayanan perizinan”.

Misi 2 : Mengandung makna bahwa perlunya meningkatkan kerjasama investasi dengan dunia usaha, antar daerah maupun Luar Negeri.

Misi Ketiga : ”Meningkatkan Profesionalisme Pelayanan Perizinan”

Misi 3 : mengandung makna bahwa perlunya meningkatkan Kualitas dan Profesionalisme dalam Pelayanan Perizinan.

Misi Keempat : ”Meningkatkan kualitas Aparatur, sarana prasarana dan tertib administrasi”

Misi 4 : Mengandung makna bahwa perlunya meningkatkan Kualitas dan Profesionalisme dalam Pelayanan Perizinan.

4.2 Tujuan Strategis

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan Visi dan Misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis lingkungan strategis. Tujuan mengarahkan perumusan strategi, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Misi dan Visi.

Berdasarkan tujuan yang ditetapkan, DPMPTSP Kabupaten Biak Numfor akan mengetahui hal-hal yang harus dicapai dalam kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, serta faktor lingkungan yang mempengaruhinya.

Perumusan tujuan strategis DPMPTSP Kabupaten Biak Numfor tahun 2020 – 2023 sesuai dengan Visi dan Misi yang telah ditetapkan sebagai berikut :

Misi Pertama : ”Meningkatkan Potensi, Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal’’

Tujuan : Meningkatkan investasi di Kabupaten Biak Numfor.

Sasaran : Meningkatnya pertumbuhan investasi.

Misi Kedua : ”Mengembangkan Kualitas Sistem Informasi penanaman modal dan pelayanan perizinan ” .

Tujuan : Meningkatnya kerjasama investasi dengan dunia usaha, antar daerah maupun Luar Negeri.

Sasaran : 1. Meningkatkan kerjasama investasi

2. Meningkatkan kualitas data, informasi dan promosi.

Misi Ketiga : ”Meningkatkan Profesionalisme Pelayanan Perizinan”

Tujuan : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perizinan.

Sasaran : 1. Terlaksananya program peningkatan hasil kerja dan kualitas kerja Sumber Daya Manusia pelayanan perizinan;

2. Terbangunnya jaringan kerja pelayanan perizinan;

3. Terlaksananya peningkatan Sumber Daya Manusia yang prima dalam pelayanan perizinan.

Misi Keempat : ”Meningkatkan kualitas Aparatur, sarana prasarana dan tertib administrasi”

Tujuan : Meningkatkan Administrasi dan Kerumahtanggaan Kantor.

Sasaran : 1. Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran

2. Meningkatnya sapras dan pemeliharaan sapras kantor

3. Meningkatnya disiplin pegawai

4. Meningkatnya akuntabilitas kinerja kantor

4.3 Sasaran Strategis

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh lembaga dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulanan atau bulanan. Sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan sehingga bersifat spesifik, terinci, dapat dicapai, dan diupayakan dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat diukur.

Sasaran-sasaran DPMPTSP Kabupaten Biak Numfor adalah sesuatu dasar di dalam penilaian dan pemantauan kinerja sehingga merupakan alat pemicu bagi organisasi akan sesuatu yang harus dicapai, dan untuk itulah DPMPTSP Kabupaten Biak Numfor telah merumuskan sasasan-sasaran berikut indikator keberhasilannya.

Misi Pertama:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | satuan | Pagu |
| 1. | Meningkatnya pertumbuhan investasi.  . | Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)  o Jumlah PMA  o Jumlah PMDN  Jumlah nilai investasi berskala nasional(PMDN/PMA)   * Nilairealisasi investasi PMA * Nilairealisasi investasi PMDN   Kenaikan/penurunan Nilai Realisasi PMDN | Perusahan  Perusahan  Milyar  Milyar | Rp.1 200.000.000,- |
| Misi kedua | | | |  |
| 2. | Meningkatkan kerjasama investasi | Rasio Daya Serap Tenaga Kerja | Dokumen | Rp.500.000.000,- |
| 3. | Meningkatkan kualitas data, informasi dan promosi.  Rasio | Promosi yang diikuti system informasi | Kali  aplikasi | Rp.500.000.000,- |
| Misi ketiga | | | |  |
| 4. | Terlaksananya program peningkatan hasil kerja dan kualitas kerja Sumber Daya Manusia pelayanan perizinan; | Penyelesaian ijin lokasi  Kenaikan pertahun | Jenis  dokumen | Rp.200.000.000,- |
| 5. | Terbangunnya jaringan kerja pelayanan perizinan; | System informasi pelayanan perijinan dan administrasi perkantoran | Jenis | Rp.300.000.000,- |
| 6. | Terlaksananya peningkatan Sumber Daya Manusia yang prima dalam pelayanan perizinan. | Indeks Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perijinan  Lama proses perijinan (rata-rata pelayanan perijinan)  Jenis perijinan yang ditangani | %  Hari kerja  Jenis | Rp.150.000.000.- |
| 7 | Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran | Perizinan yang tersertifikasi iso 2008:9001 | dokumen | Rp.400.000.000 |
| 8 | Meningkatnya sapras dan pemeliharaan sapras kantor | Kenaikan pertahun | Jenis | Rp.500.000.000,- |
| 9 | Meningkatnya disiplin pegawai Meningkatnya akuntabilitas | Absensi | Jumlah hadir | Rp.50.000.000,- |
| 10 | kinerja kantor | Kontrak Kinerja | dokumen | Rp. 200.000.000,- |
| Total Anggaran Tahun 2020 | | | | Rp.4.000.000.000,- |

4.4 Kebijakan

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman/pegangan/petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, serta Visi dan Misi Pemerintah. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat/Daerah untuk mencapai tujuan.

**BAB V**

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF**

Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif disajikan pada Tabel 5.1 berikut :

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tujuan | sasaran | Indikator  sasaran | kode | | | | Program dan kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) | Data REN Capaian Pada Tahun awal Perencan aan 2018 | Target Kinerja Program dan kerangka pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada akhir RPJMD | | SKPD Penang gung Jawab | Lokasi |
|  |  |  |  | 2020 | |  | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | target | Rp |
| Target | realisasi | Target | realisasi | Target | realisasi | Target | realisasi | Target | realisasi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Meningkatnya pertumbuhan investasi daerah | Terlaksananya pertumbuhan investasi daerah | 1. Jumlah investor 2. Jumlah nilai investasi |  |  |  |  | Program peningkatan pertumbuhan investasi di Daerah | * Banyaknya investor * Banyaknya nilai investasi | 65 | - | - | - | - | 75 | 75 | - | - | 85 | 85 |  |  |  |  |
| Meningkatnya kerjasama investasi dan kualitas data, informasi dan promosi | Terlaksananya kerjasama investasi dan kualitas data, informasi dan promosi | Jumlah kerjasana investasi  Jumlah dokumen data  Jumlah dokumen infoermasi  Jumlah kegiatan promosi |  |  |  |  | Program peningkatan kerjasama investasi dan kualitas data, informasi dan promosi | * Jumlah kerjasana investasi * Jumlah dokumen data * Jumlah dokumen infoermasi * Jumlah kegiatan promosi | 65 | - | - | - | - | 75 | 75 | - | - | 85 | 85 |  |  |  |  |
| Meningkatkan profesionalisme pelayanan perijinan | Terlaksananya prgram peningkatn hasil kerja dan kualitas kerja SDM pelayanan perijinan | Penyelesaian ijin sesuai SOP |  |  |  |  | prgram peningkatn hasil kerja dan kualitas kerja SDM pelayanan perijinan | * Tidak ada komplain | 2777 | - | - | 2777 | 2777 | 2777 | 2777 | - | - | 2777 | 2777 |  |  |  |  |
| Meningkatnya jaringan kerja pelayanan perijinan | terbangunnya jaringan kerja pelayanan perijinan | Terbangunnya SIM  Terbangunnya Jaringan |  |  |  |  | Program jaringan kerja pelayanan perijinan | * Jumlah setting perijinan * Jumlah aplikasi * Jumlah jaringan | 2 SIM | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |
| Meningkatnya SDM yang prima dalam pelayanan perijinan | Indeks kepuasan masyarakat meningkat | % prosentasi IKM |  |  |  |  | Program peningkatan SDM yang prima dalam pelayanan perijinann | * Banyaknya latihan * Banyaknya bimtek * Banyaknya diklat | 80 | - | - | 80 | 62 | 80 | 62 | 90 | 64 | 90 | 64 |  |  |  |  |
| Meningkatnya Sapras dan pemeliharaan Sapraas | Terlaksananya peningkatan Sapras dan pemeliharaan Sapraas | Jumlah Sapras |  |  |  |  | Program peningkatan Sapras dan pemeliharaan Sapraas | * Jumlah sapras | 70 | - | - | 70 | 60 | 70 | 60 | 70 | 60 | 70 | 60 |  |  |  |  |
| Meningkatkan kualitas Aparatur, sarana prasarana dan tertib administrasi | Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran | Pelayanan yang tersertifikasi iso 2008:9001 |  |  |  |  | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Prosentase pemenuhan operasional Administrasi Perkantoran | 100 % | - | - | 100% | 45 % | 100% | 45% | 100% | 45% | 100% | 45% |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Penyediaan Jasa Komunikasi,  Sumber daya listrik dan Air | Jumlah jasa Komunikasi | 100% | 100% | 100% | 100% | 45 % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor | Jumlah penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 100 % | 100% | 87% | 100 % | 0 | 100% | 80% | 100% | 90% | 100% | 100% |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Penyediaan jasa administrasi keuangan | Jumlah petugas (OB) pengadministr asian Keuangan | 4 | 4 | 0 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Penyediaan jasa kebersihan kantor | Jumlah bulan petugas jasa (OB) kebersihan dan jumlah jenis peralatan pembersih | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Penyediaan alat tulis kantor | Jumlah jenis penyediaan Alat tulis kantor | 100% | 100% | 100% | 100% | 45% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Penyediaan barang cetakan dan penggandaaan | Jumlah penyediaan bahan cetakan dan penggandaan | 100% | 100% | 100% | 100% | 45% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Jumlah alat - alat listrik dan elektronik | 100% | 100% | 70% | 100% | 80% | 100% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 100% | 100% | 80% | 100% | 0 | 100% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Kegiatan penyediaan makanan dan minuman | Jumlah Paket/Porsi/Bo x makanan dan minuman untuk rapat dinas dan piket dina | 100% | 100% | 80% | 100% | 25% | 100% | 90 | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Rapat rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah | Jumlah Pertemuan Koordinasi dan Konsultas | 100% | 100% | 90% | 100% | 45% | 100% | 90 | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Penyediaan pendukung tenaga teknis dan administrasi perkantoran | Jumlah (OB) Tenaga Pendukung Teknis Administrasi Perkantoran | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Rapat rapat koordinasi dan konsultasi kedalam daerah | Jumlah pertemuan koordinasi dan konsultasi | 100% | 100% | 30% | 100% | 45% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Penunjang hari hari besar | Jumlah Kegiatan Menunjang perayaan harihari besar bersejarah | 100% | 100% | 90% | 100% | 0 | 100% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur | Prosentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur | 100% | 100% | 0% | 100% | 70% | 100% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Pengadaan Kendaraan Dinas /Operasioana l beserta kelengkapany a | Jumlah kendaraan dinas Roda 4 dan roda 2 sebagai penunjang operasional DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Pengadaan Mebeulair | Jumlah paket pengadaan Mebeulair Meja dan Kursi | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor | Jumlah Bildboard Perijinan | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | Jumlah paket pemeliharaan gedung/kantor | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas oprasional | Jumlah kendaraan roda 4 dan kendaraan roda | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Pemeliharaan rutin berkala meubeler | Jumlah paket pengadaan mebeuler meja dan kursi kantor yang diperbaiki | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Pemeliharaan rutin berkala hardsare dan software | jumlah paket Pemeliharaan rutin/berkala software, Hardware dan Jaringan | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Rehabilitasi Sedang/berat gedung/kanto r | Jumlah Paket rehabilitasi gedung/kantor | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Program peningkata Disiplin Aparatur | Persentase pemenuhan Operasional Kantor | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapan ya | Jumlah Pakaian Dinas beserta Perlengkapann ya | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Pengadaan Pakaian Khusus Harihari tertentu | Jumlah Pakaian Khusus Harihari tertentu | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur | Prosentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Sosialisasi Peraturan perijinan | Terlaksananya sosialisasi peraturan perundangundangan ketatausahaan dan perijinan | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Program peningkatan pengembang an sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | Prosentase Ketersediaan Pelaporan Kecapaian Kinerja dan Keuangan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Penyusunan Laporan capaian kinerja dan Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah jenis dokumen (buku) (Renstra, LAKIP, Laporan Tahunan, Renja, RKA, DPA, , LKPJ,LPPD, SPM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran | Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran Dinas | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Penyusunan Laporan Keuangan akhir tahun | Jumlah dokumen laporan keuangan Dinas akhir tahun | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Jumlah Belanja RENJA RUTIN |  | 500 JT |  |  | 500 JT | 225 JT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**BAB VI**

**INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU**

**PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

6.1 Indikator Kinerja SKPD Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD disajikan pada tabel berikut: Tabel 6.1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Program/ Kegiatan | Indikator | Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD  2018 | Target Capaian SetiapTahun | | | | | Kondisi Kinerja pada akhir Renstra |
| 2017 | 2018 | 2020 |  | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Program peningkatan pertumbuhan investasi di Daerah | * Banyaknya investor * Banyaknya nilai investasi | 298 USAHA  164 M | -  - | 298  164 M | 300  200 M | 300  200 M | 300  200 M | 900  600 M |
| 2 | Program peningkatan kerjasama investasi dan kualitas data, informasi dan promosi | * Jumlah kerjasana investasi * Jumlah dokumen data * Jumlah dokumen infoermasi * Jumlah kegiatan promosi | 0  2777  1  0 | 0  -  0  0 | 0  2777  1  0 | 1  3500  1  1 | 1  3500  3  1 | 1  3500  3  1 | 3  10500  7  3 |
| 3 | prgram peningkatn hasil kerja dan kualitas kerja SDM pelayanan perijinan | * Tidak ada komplain | 24 | 35 | 24 | 10 | 5 | 0 | 0 |
| 4 | Program jaringan kerja pelayanan perijinan | * Jumlah setting perijinan * Jumlah aplikasi * Jumlah jaringan | 4  4  2 | -  -  - | 4  4  2 | 50  4  2 | 60  4  2 | 93  4  2 | 93  4  2 |
| 5 | Program peningkatan SDM yang prima dalam pelayanan perijinann | * Banyaknya latihan * Banyaknya bimtek * Banyaknya diklat | 3  3  - | -  -  - | 3  3  - | 4  4  - | 4  4  - | 4  4  - | 15  15  - |
| 6 | Program peningkatan Sapras dan pemeliharaan Sapraas | * Jumlah sapras | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 7 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Prosentase pemenuhan operasional Administrasi Perkantoran | 45% | - | 45% | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  | Penyediaan Jasa Komunikasi,  Sumber daya listrik dan Air | 45% | - | 45% | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  | Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 30 |
|  |  | Penyediaan jasa administrasi keuangan | Jumlah petugas (OB) pengadministr asian Keuangan | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  |  | Penyediaan jasa kebersihan kantor | Jumlah bulan petugas jasa (OB) kebersihan dan jumlah jenis peralatan pembersih | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  |  | Penyediaan alat tulis kantor | Jumlah jenis penyediaan Alat tulis kantor |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Penyediaan barang cetakan dan penggandaaan | Jumlah penyediaan bahan cetakan dan penggandaan | - | - | 2 | 2 | 2 | 6 |
|  |  | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Jumlah alat - alat listrik dan elektronik | - | - | 2 | 3 | 4 | 9 |
|  |  | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 11 | 11 | 20 | 20 | 20 | 60 |
|  |  | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan | - | - | 2 | 3 | 4 | 9 |
|  |  | Kegiatan penyediaan makanan dan minuman | Jumlah Paket/Porsi/Bo x makanan dan minuman untuk rapat dinas dan piket dina | - | - | 1 | 1 | 1 | 3 |
|  |  | Rapat rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah | Jumlah Pertemuan Koordinasi dan Konsultas | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  |  | Penyediaan pendukung tenaga teknis dan administrasi perkantoran | Jumlah (OB) Tenaga Pendukung Teknis Administrasi Perkantoran | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 |
|  |  | Rapat rapat koordinasi dan konsultasi kedalam daerah | Jumlah pertemuan koordinasi dan konsultas | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
|  |  | Penunjang hari hari besar | Jumlah Kegiatan Menunjang perayaan harihari besar bersejarah | - | - | - | 1 | 1 | 2- |
|  |  | Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur | Prosentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur | - | - | - | 1 | 1 | 2 |
|  |  | Pengadaan Kendaraan Dinas /Operasioana l beserta kelengkapany a | Jumlah kendaraan dinas Roda 4 dan roda 2 sebagai penunjang operasional DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP | 1 DAN 5 | 1 DAN  5 | 1 | 1 | 1 | 4 |
|  |  | Pengadaan Mebeulair | Jumlah paket pengadaan Mebeulair Meja dan Kursi | 11 | - | - | 20 | 20 | 40 |
|  |  | Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor | Jumlah Bildboard Perijinan | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 |
|  |  | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | Jumlah paket pemeliharaan gedung/kantor | - | - | - | 1 | 1 | 2 |
|  |  | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas oprasional | Jumlah kendaraan roda 4 dan kendaraan roda | - | 1 | 1 | - | - | 2 |
|  |  | Pemeliharaan rutin berkala meubeler | Jumlah paket pengadaan mebeuler meja dan kursi kantor yang diperbaiki | - | 3 | 4 | 4 | 4 | 21 |
|  |  | Pemeliharaan rutin berkala hardsare dan software | jumlah paket Pemeliharaan rutin/berkala software, Hardware dan Jaringan | - | - | - | 1 | 1 | 2 |
|  |  | Rehabilitasi Sedang/berat gedung/kanto r | Jumlah Paket rehabilitasi gedung/kantor | - | - | - | 1 | 1 | 2 |
|  |  | Program peningkata Disiplin Aparatur | Persentase pemenuhan Operasional Kantor | - | 45% | 45% | 100% | 100% | 100% |
|  |  | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapan ya | Jumlah Pakaian Dinas beserta Perlengkapann ya | - | - | - | 1 | 1 | 2 |
|  |  | Pengadaan Pakaian Khusus Harihari tertentu | Jumlah Pakaian Khusus Harihari tertentu | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
|  |  | Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur | Prosentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur | - | 25% | 25% | 25% | 25% | 80% |
|  |  | Sosialisasi Peraturan perijinan | Terlaksananya sosialisasi peraturan perundangundangan ketatausahaan dan perijinan | - | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 |
|  |  | Program peningkatan pengembang an sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | Prosentase Ketersediaan Pelaporan Kecapaian Kinerja dan Keuangan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |
|  |  | Penyusunan Laporan capaian kinerja dan Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah jenis dokumen (buku) (Renstra, LAKIP, Laporan Tahunan, Renja, RKA, DPA, , LKPJ,LPPD, SPM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran | Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran Dinas | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  |  | Penyusunan Laporan Keuangan akhir tahun | Jumlah dokumen laporan keuangan Dinas akhir tahun | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | Jumlah Belanja RENJA RUTIN | Prosentase pemenuhan operasional Administrasi Perkantoran | - | 45% | 100 % | 100% | 100% | 100% |

BAB VII

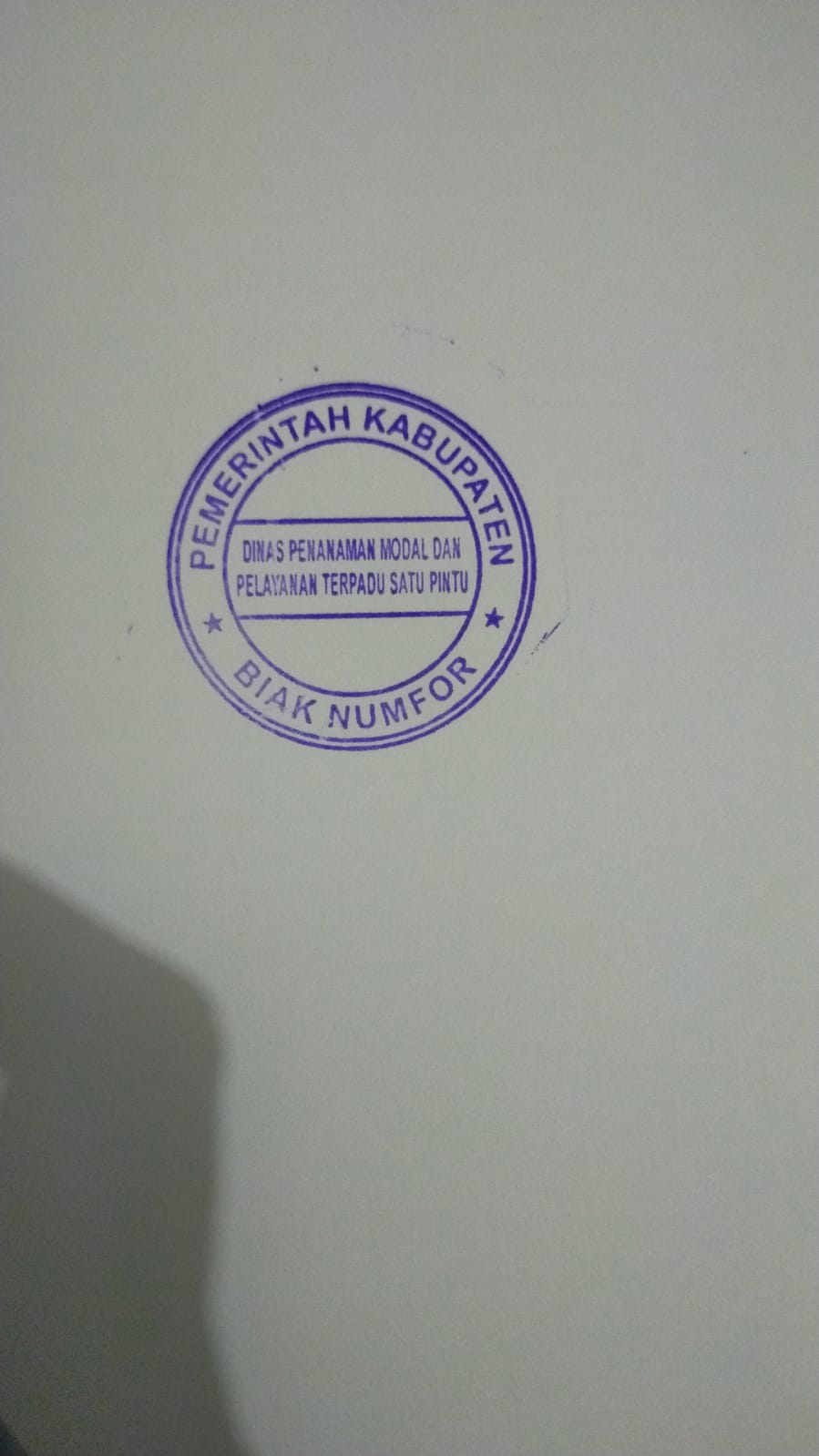
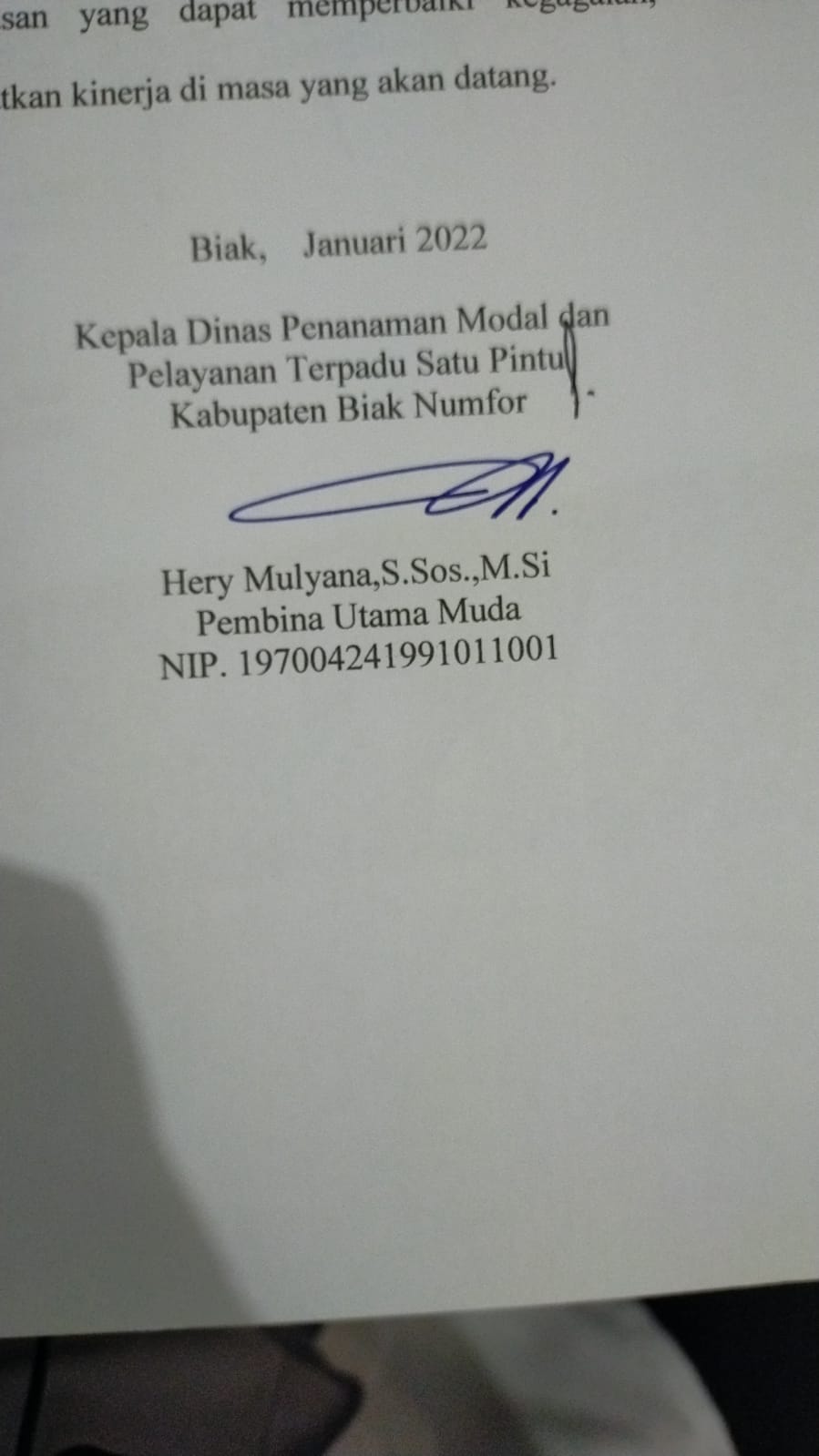
PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Biak Numfor Tahun 2019-2023 disusun, sebagai gambaran arah kebijakan dan strategi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Biak Numfor disusun dengan mengacu kepada :

* 1. Hasil-hasil yang dicapai pada periode 2011 – 2014
  2. Permasalahan dan tantangan yang dihadapi, dan
  3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2014-2020.

Penyusunan Rencana Strategis Tahun 2019-2023 ini dimaksudkan untuk mewujudkan peningkatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Biak Numfor yang profesional, kreatif, inovatif sebagai upaya untuk mendukung terwujudnya capaian kinerja penanaman modal dan perizinan di Kabupaten Biak Numfor .

Selain itu Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Biak Numfor Tahun 2020- juga menjadi acuan dan pedoman dalam penyusunan rencana kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Biak Numfor, sehingga menghasilkan sinergitas dalam pelaksanaan program dan kegiatan penanaman modal dan perijinan di Kabupaten Biak Numfor .

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL

DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN BIAK NUMFOR

**HERY MULYANA,S.Sos.,M.Si**

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP.197004241991011001